

Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa

Oleh:

Natalia H.M. Rengkuan¹
Daud M. Liando²
Donald K. Monintja³

Email Korespondensi: @rengkuannataliahelena@gmail.com

Abstrak

Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Nawacita Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa, adalah salah satu program unggulan pemerintah daerah. Penulis menelitinya dan mendapatkan bahwa komunikasi yang terjadi dalam kantor dinas Kominfo telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan, instruksi atau perintah pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sudah jelas, informasi yang diberikan pimpinan terhadap pegawai pelaksana sudah jelas serta mudah dipahami oleh staf/pegawai pelaksana, sehingga setiap pelatihan untuk pemberdayaan terlaksana dengan baik dan Efektif. Perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, waktu, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya .

Kata Kunci : Efektifitas, Kinerja Pemerintah, Reaksi Respon Realief Daerah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Kabupaten dari 15 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 25 Kecamatan, 227 Desa dan 43 Kelurahan. merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang beribukotakan Tondano. Reaksi Respon Realief Daerah yang merupakan program utama pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam R3D diantaranya.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan

pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website seperti R3D CALL CENTER. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan eGovernment sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Salah satu

aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan.

Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Minahasa cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan electronic Government (e-Government).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD dengan adanya program Nawacita R3D Reaksi Respon Realief yang ada di

Kabupaten Minahasa dimana dapat menampung segala aspirasi dan keluhan oleh masyarakat.

Program R3D ini berjalan makin efektif sejak R3D Call Center yang dibuat sebagai sarana pengaduan tidak semua keluhan masyarakat dapat diterima dan di tindak lanjuti banyak keluhan mengenai hal ini mengenai pengeluhan disaring dan dipilih dalam penanganan yang viral saja yang diutamakan bukan yang sudah terdampak selanjutnya membangun Minahasa dari “pinggiran” danau, pemanfaatan perairan atau pemanfaatan ruang perairan danau Tondano saat ini cenderung tidak hanya mempedulikan daya dukung sumber daya air yang saat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai lahan pariwisata, namun prinsip konservasi dan keseimbangan dalam pemanfaatan perairan danau mesti diperhitungkan dengan baik, sehingga siklus-siklus di dalam ekosistem perairan danau dapat berlangsung semestinya.

Seperti organisasi pada umumnya, pemerintah juga berusaha untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin. Kinerja pemerintah dapat dalam bentuk pelayanan publik, serapan anggaran, capaian *output* dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dari instansi pemerintah. Semua organisasi sektor publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di bidang-bidang tertentu (Mochamad Muslih, *et al.* 2019). Kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan tergantung banyak variabel, misalnya besar institusi dan kondisi tata kelolanya.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi: Pengolahan Data, Pengelolaan Informasi, Sistem Manajemen, Proses Kerja.

Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan setiap pemerintah daerah, dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama mendorong dan memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Dilain pihak, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal pada pembangunan sehingga partisipasi diperlukan upaya dan langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan serta merealisasikan program kerja yang sudah ada di Kabupaten Minahasa.

Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yang dicapai seseorang. Perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, waktu, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Maka dari uraian permasalahan di atas, penulis mengangkat topik “Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Nawacita Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif

sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan tentang seseorang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan semua data atau objek penelitian atau situasi objek penelitian, menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, dan mencoba memberikan solusi untuk masalah, sehingga tetap *up to date*. Informasi yang didapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada berbagai masalah. Secara umum penelitian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang berusaha menggambarkan atau menggambarkan peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual, dan akurat.

Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode kualitatif ini. Ini berarti bahwa metode kualitatif lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas. Metode ini lebih sensitif karena secara langsung mewakili sifat hubungan antara peneliti dan responden. Mampu mengadaptasi dan mempertajam interaksi nilai dan pola perilaku yang dihadapi penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta tentang kinerja pemerintah terkait program Nawacita R3D .

Penerapan pendekatan kualitatif, mengingat kemungkinan penyajian data yang diperoleh di lapangan berupa fakta-fakta yang memerlukan analisis rinci. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memfasilitasi perolehan data yang lebih rinci, terutama ketika penulis sendiri terlibat di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penulis menjadi

alat utama dalam mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan instrumen atau subjek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Minahasa, Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, Dinas Pariwisata, Masyarakat Pinggiran Danau Tondano. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa alasan, diantaranya penulis merupakan penduduk asli di lokasi penelitian, hal ini untuk memudahkan penulis dalam proses penelitian baik jarak, waktu dan tenaga.

Fokus Penelitian

Suatu penelitian perlu dibatasi dan difokuskan pada masalah yang diteliti sehingga penelitian dapat berorientasi pada tujuan dan menghindari sikap peneliti yang bias ketika melakukan analisis data. Menurut Moleong (2011), penentuan fokus adalah isu kunci dalam penelitian yang mempunyai fungsi membatasi penelitian kualitatif dan membantu menentukan kriteria inklusi/eksklusi atau kriteria masuk dan keluar untuk informasi yang baru diperoleh di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemfokusan dapat membantu peneliti membuat keputusan berdasarkan informasi tentang data apa yang akan dikumpulkan dan apa yang tidak relevan walaupun menarik, tidak harus disertakan dalam kumpulan data yang sedang dikumpulkan.

Pada Penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada dua masalah pokok sesuai judul penelitian yang diangkat, yakni upaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam program Nawacita R3D

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Wawancara Dari data-data yang di dapat selama penelitian, Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Agus Dwiyanto (2002:48) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

Produktivitas Kerja

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar *input* dan *output*. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting berdasarkan hasil penelitian di lapangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik.

Peneliti menanyakan bagaimana tanggapan saudara

tentang kinerja Dinas Kominfo Minahasa dalam menangani program khususnya dalam Reaksi Respon Realief di Kabupaten Minahasa, apakah sudah cakap dan tanggap sesuai dengan harapan saudara sebagai tokoh masyarakat Informan menjawab:

“Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan penerimaan layanan masyarakat , sehingga implementasi e-government dalam reaksi respon realief daerah belum sepenuhnya didukung Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada untuk mempermudah masyarakat dalam pelaporan.

Wawancara selanjutnya dengan salah Aktifis yang sangat vocal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Bapak Marino Gonzaga dengan pertanyaan: tantangan apa yang membuat dinas kominfo dalam hal ini belum biasa menjalankan program yang optimal dari Bupati Wakil Bupati yaitu R3D informan menjawab

Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan program R3D yang telah disusun belum matang dalam kurun waktu akhir masa jabatan

Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan

cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada salah satu masyarakat yang pernah melakukan pelaporan kepada dinas kominfo saudara Amelia Salleh, SH dan bertannya mengenai kualitas layanan yang diberikan? informan menjawab:

Sarana dan prasarana dalam kualitas layanan yang kurang memadai menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Minahasa. Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterbatasan dari sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas. Tanpa sarana dan prasarana yang lengkap dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab sehingga akan tetap terjadi peningkatan kasus pelanggaran informasi yang beretika dan bertanggung jawab Pelayanan untuk masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang cukup mendapatkan perhatian bagi aparatur pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan aktivitasnya dengan aparatur pemerintah tentu akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini

dilakukan oleh instansi pemerintah lewat aparturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna.

Responsivitas Aparat

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peneliti bertanya pada unsur dinas kominfo minahasa dalam hal ini Pimpinan instansi/Kepala Dinas, ibu Maya Marina Kainde, bagaimana respon ibu mengenai respontabilitas aparat mengenai program agar dapat tercapai peneliti menjawab:

“Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas responsivitas aparat adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam

hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Dengan Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa di bidang Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

Akuntabilitas Kerja

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Peneliti bertanya masih kepada dinas terkait upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan program dalam pemenuhan aspirasi dan pelaporan?

“Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahas ayang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa yang lebih sejahtera dan dapat merasakan program penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan demi Terwujudnya Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera. Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penutup

Kesimpulan

Sasaran yang melatar belakangi penelitian ini adalah setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia karena tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah pemberi pelayanan, namun kinerja juga sangat penting.

Komunikasi yang terjadi dalam kantor dinas Kominfo telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang

ditetapkan, instruksi atau perintah pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sudah jelas, informasi yang diberikan pimpinan terhadap pegawai pelaksana sudah jelas serta mudah dipahami oleh staf/pegawai pelaksana, sehingga setiap pelatihan untuk pemberdayaan terlaksana dengan baik dan Efektif.

Perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, waktu, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai seseorang persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya .

Saran

Berdasarkan tinjauan peneliti ketika melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kekurangan yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya dianas kominfo dan dinas pariwisata Sesuai dengan harapan dan fokus yang ingin diwujudkan maka Visi-misi R3D ditetapkan berangkat dari analisis kekuatan, kelemahan dan peluang serta tantangan yang didapati dalam pembangunan daerah Kabupaten Minahasa diarahkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kepemimpinan yang ideal.

Integritas kepemimpinan mengacu pada kualitas moral dari proses pemerintahan sebagai

legitimasi dan kredibilitas kekuasaan kiranya dapat lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam hal ini petani di lapangan, cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang ada dengan melakukan penyuluhan secara konstan, efisien dan akuntabel. Arah kepemimpinan R3D dalam Visi “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera” yang merupakan prinsip moral yang kuat dalam mengujudkan tekad dari seorang pemimpin yang berkeinginan memajukan Minahasa konsep pengelolaan danau terpadu bagi Danau Tondano saat ini sangat diperlukan yang didampingi oleh penentuan “goal atau target” yang bernuansa berkelanjutan bagi pengelolaan Danau Tondano yang berarti.

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kepekaan terhadap masalah daerah, lebih lagi bisa berkreasi dan berinovasi supaya tetap boleh bersaing dimasa yang sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, S. Ruky. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Aditama. PT. Gramedia Pustaka.
- Agus Dwiyanto. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Asmarantaka, R.W. 2012. *Pemasaran Agribisnis (Agrimarketing)*. Dapertemen Agribisnis. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- C.F Strong. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Terjemahan. Bandung: Nusa Media.

- Chabib, Soleh, dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Dessler, Gary. 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Dincer, H, Hacıoglu, U, Yuksel, S. 2017. *Balanced scorecard based performance measurement of European airlines using a hybrid multicriteria decision making approach under the fuzzy environment*. Journal of Air Transport Management, 63. Turkey: Elsevier.
- Eddy, Ch. Papilaya. 2001. *Pengertian Efektivitas Dan Tujuan Efektivitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jim, Ife. 2008. *Konsep Pemberdayaan dan PengertianPemberdayaan*. Bandung: Humaniora.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. *Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Lexy J.Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mochamad Muslih et al. 2019. *Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nicholson, W. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa oleh IGN Bayu Mahendra dan Abdul Aziz. Yogyakarta: Erlangga.
- Putong. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardi et al. 2003. *Agribisnis Tanaman Perkebunan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Royke Roring Dan Robby Dondokambey .2018 *Potret R3D dalam 3 Tahun Kepemimpinan*
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Strategi Politik Roy Roring Dan Robby Dondokambey pada Pilkada Kabupaten Minahasa Hugo Flavio Sondakh.2018
- Strauss A. & Corbin. J. 2003. *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Referensi lain:
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun 2018- 2023.

- Portal Kabupaten Minahasa,
<https://minahasa.go.id>
- R3D Call Center.